



# Terpaksa Kucing-kucingan Dengan Petugas

## ■ Pemkot Larang Pedagang Asongan Berjualan di Malioboro

**YOGYA, TRIBUN** - Puluhan pedagang asongan di kawasan Malioboro menyambangi gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (14/3). Mereka datang untuk mengadukan nasibnya kepada wakil rakyat, setelah aktivitas ekonominya dilarang, pasca-penataan pedagang kaki lima (PKL) tempo hari.

Dalam kesempatan tersebut Komunitas Asongan Malioboro diterima langsung oleh Ketua Pansus Penataan Malioboro DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Pokki Ardianto. Para pelaku usaha kecil itu pun meminta legislasi untuk menjangkau perjuangannya demi mendapatkan sumber penghidupan.

"Kami menuntut kebijakan secara berkeadilan, supaya kami bisa mengis rezeki lagi di kawasan Malioboro. Selama ini tidak ada masalah, tapi setelah ada penataan kami tidak boleh lagi berjualan," keuh Ketua Komunitas Asongan Malioboro, Raden Ridwan Suryo Bintoro.

Ia menyampaikan, pelanggaran tersebut mulai diterapkan per 1 Februari 2022 silam, di mana petugas keamanan Malioboro getol mengusir para pedagang asongan. Padahal, katanya, selaras Peraturan Gubernur (Pergub) DIY, penataan yang ditempuh hanya menasars PKL, bukan asongan.

"Secara substansi Pergub menyatakan hanya terkait dengan relokasi PKL, tidak ada esensi yang menyebut

asongan. Tapi, sejak 1 Februari kita dilarang itu pun tidak ada surat resmi, uji-ujug petugas Jogoboro melarang," ujarnya.

"Kalau secara legalitas, kami memang tidak ada. Tapi, sejak dulu kita bertinggan dengan PKL, sudah ada kesepakatan juga dengan UPT. Kami berseragam semuanya loh, kok sekarang asongan diusir begitu saja," tambah Ridwan.

Pedahal, katanya, banyak di antara pedagang asongan yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun di kawasan Malioboro, dan tidak pernah menjumpai polemik semacam ini. Alhasil, pihaknya pun menuntut Pemkot Yogyakarta, atau Pemda DIY, supaya memfasilitasi asongan.

Sembani menanti respon dari pemerintah, untuk sementara, anggotanya pun masih tetap berjualan di kawasan Malioboro. Namun, mereka kini hanya dapat melanjutkan aktivitas ekonominya di strip-strip saja, mengingat petugas keamanan yang berjaga intensif melakukan pengawasan.

"Bagaimanapun juga kami ingin bertahan hidup. Sementara kami jualan di strip Malioboro, yang berada di luar jangkauan UPT. Kita delik-delikan, kucing-kucingan dulu lah. Ya, mau bagaimanapun juga, kita ngga ada modal," urainya.

**Legal**  
 Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan, pedagang asongan tetap dilar

ang berjualan di kawasan Malioboro. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti, mengatakan, mereka tidak memiliki aspek legalitas, sehingga tidak bisa berdagang di area tersebut.

"Secara prinsip, kami memang melarang asongan di Malioboro, bahkan sebelum relokasi dilakukan. Semuanya tidak teregister, sama Jogoboro juga sudah dilarang. Cuma, karena jumlahnya banyak, masih ada yang kucing-kucingan sehingga luput dari petugas," ujar Yeti.

Karena itu, dengan keberadaan pedagang asongan yang luput dari petugas keamanan di Malioboro, bukan berarti pihaknya memberikan izin bagi mereka untuk berdagang. Terlebih, ia memastikan, pihak UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya juga tidak pernah memberikan izin.

"Kita nggak pernah mengeluarkan itu. Bahkan, kita pernah mengeluarkan salah satu petugas di sana karena bermain. Kami ingin membersihkan itu dari oknum-oknum yang melakukan dengan mengatasnamakan UPT," tegasnya.

Menurutnya, penanganan asongan jelas tak bisa disamakan dengan PKL yang sebelumnya memiliki legalitas namun tidak diperpanjang



GRAFIS/FAUZIA RAHMAN

dan ditempuh relokasi. Sementara asongan, katanya, statusnya ilegal, sehingga petugas di lapangan pun sejak dulu sudah getol melakukan upaya pembersihan.

"Asongan sama sekali tidak punya legalitas, bahkan kami sudah melarang mereka berada di kawasan Malioboro pada waktu itu, sebelum relokasi. Tapi, yang namanya asongan, mereka pintar bermain di lapangan," terangnya.

Hal tersebut, katanya, jelas sangat berbeda dengan saat PKL masih memenuhi pedestrian, maupun lorong-lorong toko, di mana asongan seringkali membaur dengan mereka. Sedangkan, petugas yang disilagakannya di sepanjang Malioboro bisa dibilang sangat terbatas.

"Satu sif hanya 24 petugas Jogoboro itu, ya, tentu tidak memadai. Sehingga, dulu sangat susah untuk mendeteksi asongan yang harus dikeluarkan. Apalagi, begitu kami keluaran, ada yang masuk lagi," tandasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005